



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Maret 2018/Periodik - 2017)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ASHARI**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **234508**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	245.726.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 94 m2/150 m2 di SLEMAN, WARISAN Rp. 115.000.000		
2. Tanah Seluas 242 m2 di SLEMAN, WARISAN Rp. 21.000.000		
3. Tanah Seluas 543 m2 di SLEMAN, WARISAN Rp. 44.526.000		
4. Tanah dan Bangunan Seluas 184 m2/50 m2 di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 65.200.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	76.000.000
1. MOBIL, SUZUKI SIDEKICK SEPEDA MOTOR Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000		
2. MOTOR, KAWASAKI NINJA RR SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000		
3. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
4. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	11.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	31.467.595
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	364.193.595
III. HUTANG	Rp.	11.500.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	352.693.595

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **23 Oktober 2018**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.